

UNIVERSITAS QUALITY	No: FP-GPM.MPS.03.01.08
FAKULTAS PERTANIAN	Tanggal: 03 Juni 2016
MANUAL PENETAPAN	Revisi: 0
STANDAR PEMBIAYAAN	Halaman : 1 dari 7
PEMBELAJARAN	

MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS PERTANIAN

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
A MAN	Wins'	Danning	Charles and the second
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

	Visi Fakultas Pertanian:				
	"Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan				
	professional dan memiliki daya saing nasional di bidang				
	pendidikan pertanian "				
	Misi Fakultas Pertanian:				
	1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti				
	perkembangan temuan di bidang pertanian.				
1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian	2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada				
1 4444444 1 64 644444	masyarakat yang berbasis penelitian pertanian.				
	3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional				
	dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi				
	pertanian.				
	4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan				
	5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa				
	serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya				
	Indonesia.				
	1. Acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan				
	standar pembiayaan dalam upaya peningkatan				
	pembiayaan secara kontiniu dan berkelanjutan sehingga				
	tercipta budaya pembiayaan di FP.				
2. Tujuan Manual	2. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen				
Penetapan Standar	dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan				
	tugas masing masing untuk mewujudkan budaya				
	pembiayaan.				
	3. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar				
	pembiayaan.				
3. Luas Lingkup	Manual pembiayaan standar pembiayaan ini disusun agar				
Manual Penetapan	menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan pembelajaran				
Standar	baik di tingkat Universitas, maupun program studi. Manual				

	peneta	pan standaı	r pembiayaan ini berlaku ke	tika sebuah standar
	yang mencakup aspek, sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang			
	dinyatakan dalam rumusan kompetensi/capaian yang hendak			
	diranca	ang, dirumu	ıskan, dan ditetapkan oleh ti	m.
	1.	Merencan	akan standarmerupakan (olah pikir untuk
		menghasil	kan standar mengenai ha	al apa saja yang
		dibutuhka	n dalam SPMI-FP yaitu de	engan menjabarkan
		standar na	asional pembelajaran yang	mengatur berbagai
		aspek seca	ara lebih rinci.	
	2.	Merumusl	kan standar dapat mengguna	kan struktur bahasa
		norma ata	u kaidah, yang mengandung	unsurABCD, yaitu
4. Defenisi Istilah		Audience	(subjek), Behaviour (pred	likat), Competence
4. Detemsi istnan		(objek), da	an <i>Degree</i> (keterangan).	
	3.	Menetapk	an standar adalah tindakan	berupa persetujuan
		dan peng	esahan standar sehingga s	standar yang telah
	ditetapkan dinyatakan berlaku.			
	a. Rincian Kegiatan			
		Subyek	Penjelasan Tentang	
	No	/	Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen
		Pelaku	Diiakukan	
			1. Menetapkan tim	a. Surat tugas
			SPMI untuk	Rektor untuk
			penyusunan Buku	Tim SPMI
5. Langkah-langkah			Standar Pembiayaan	b. SK Rektor
Prosedur			Pembelajaran,	tentang
Penetapan Standar		Rektor/	melalui surat tugas	pemberlakua
	1.	Wakil	Rektor.	n standar
	Rektor	Rektor	2. Bersama dengan tim	Pembiayaan
			SPMI menyusun	,
			standar dan norma	Pembelajara
	1 1		yang harus	n
			yang harus	a Dw-£11
			diperhatikan pada	c. Draf buku
				c. Draf buku Standar

		Standar Pembiayaan Pembelajaran. 3. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran, beserta manual standar yang menyertainya.
2.	LPMI dan Tim	 Menjadikan visi, misi dan tujuan FP sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dimulai dari merancang hingga menetapkan standar. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek kegiatan Pembiayaan Pembelajaran yang akan dibuat standarnya. Mengumpulkan dan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek kegiatan Pembiayaan Pembelajaran yang akan dibuat standarnya. Mencatat apa yang menjadi norma

	3.	Dekan dan Kaprodi Bagian Keuang an	mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh saran. 9. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari no.8 Pimpinan Fakultas, lembaga, dan Tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan standar. Bagian Keuangan diberi kewenangan untuk menjalankan standar.	- Draf buku Standar Pembiayaan Pembelajaran Standar Pembiayaan Pembiayaan Pembelajaran
	1.		I menetapkan untuk penyus an Pembelajaran, melalui su:	
	2.	Tim SPM	II menyusun standar dan an pada saat menetapkan S	norma yang harus
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan	3.	 Pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran, beserta manual standar yang 		
Manual Penetapan Standar	menyertainya. 4. Visi, misi dan tujuan FP sebagai titik tolak dan tujuan			
	akhir, dimulai dari merancang hingga menetapka			
	standar.			
	5.	Isi semua	peraturan perundang-undar	ngan dan peraturan

	aspek kegiatan Pembiayaan Pembelajaran yang akan
	dibuat standarnya.
	6. Norma hukum, atau syarat yang tercantum dalam
	peraturan perundang-undangan dicatat agar tidak terjadi
	penyimpangan.
	 Evaluasi diri dengan menerapkan analisa SWOT.
	8. Studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan
	dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
	9. Analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga 5 dengan
	mengujinya terhadap Visi, Misi dan Tujuan FP.
	10. Draf awal standar dirumuskan dengan menggunakan
	rumus ABCD.
	11. Uji publik atau sosialisasi draf standar dengan
	mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau
	eksternal untuk memperoleh saran.
	12. Pernyataan standar dirumuskan dengan memperhatikan
	hasil dari no.8.
	13. Pimpinan Fakultas, lembaga, dan Tim diberi kewenangan
	untuk menjalankan standar.
	14. Bagian Keuangan diberi kewenangan menjalankan
	standar.
	1. Dokumen standar pembiayaan pembelajaran;
7. Dokumen Terkait	2. Statuta
7. Dokumen Terkart	3. Renstra
	4. Pedoman akademik
	5. SK Rektor
	6. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas
	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan
	dokumen tertulis berupa:
8. Referensi	1. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal
	Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal
	Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti, 2010.

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 4. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
 Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.